

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah sebesar 1.904.569 km<sup>2</sup>, Indonesia juga terletak diantara dua benua serta di apit oleh dua Samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang menjadikan Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga Indonesia juga disebut sebagai negara maritim, hal ini juga menjadikan masyarakat Indonesia tidak lepas dari kehidupan di perairan hingga bibir pantai, baik itu sebagai sarana perjalanan untuk menuju pulau-pulau yang terpisah dan juga sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan memiliki tugas pokok yaitu memfasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya. Selain itu juga memiliki tugas dalam hal pengawasan dan pemanfaatan sumberdaya ikan hingga pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Pelabuhan juga ada beberapa jenis yang di bedakan berdasarkan fungsi dan kapasitasnya, dan salah satu diantaranya adalah Pangkalan Pendaratan Ikan yang memiliki kapasitas dan fungsi, mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Panjang dermaga paling pendek 13 m, dengan kedalaman kolam minimal minus 1 m, dan memiliki atau memanfaatkan lahan sekurang-kurangnya 1 ha. (gunugkidulkab, 2022)

Pangkalan pendaratan ikan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas produksi dan pemasaran hasil perikanan saja, namun juga memiliki potensi pariwisata, hal ini dikarenakan pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat bagi wilayah yang mengelola dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan mendapatkan manfaat dari dua sektor yaitu sektor Pariwisata dan sektor Kelautan dan Perikanan.

Pembangunan pangkalan pendaratan ikan merupakan wujud dari pertumbuhan masyarakat pesisir. Namun, masih banyak problematika yang

terjadi ketika pembangunan berlangsung seperti, lokasi yang memiliki akses yang sulit, cuaca yang memasuki musim penghujan, dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan waktu pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan pastinya memberikan dampak yang banyak bagi keberlangsungan pembangunan tersebut.

Berita dari (detikbali, 2022) Sejumlah proyek infrastruktur di kabupaten Klungkung mengalami keterlambatan. Hal itu terungkap saat tim monitoring dan evaluasi Monev Pembangunan Kabupaten Klungkung melakukan peninjauan pembangunan fisik tahun anggaran 2022, Jumat 16/9/2022. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta ini menyorot pembangunan fisik yang ada di dua kecamatan Kabupaten Klungkung, yakni di wilayah Dawan dan Klungkung. Atas kondisi itu Suwirta meminta kontraktor untuk menambah pekerjaanya. Dalam pengamatan di lapangan, dari tujuh proyek yang diamati, Tim Monitoring mendapati sebagian besar pekerjaan mengalami keterlambatan, terutama pada pekerjaan fisik pembangunan di RSUD Klungkung.

Berita dari (metrosulteng, 2023) Dua paket proyek di Kabupaten Poso, Sulteng, yang bersumber dari APBN Kementerian Agama tahun 2022, tidak selesai dikerjakan sesuai waktu yang tertera dalam kontrak. Proyek ini mengalami keterlambatan. Dua paket proyek tersebut yaitu, rehab kantor Kemenag Poso tahun 2022 dengan anggaran Rp 620 juta. Sedangkan satunya lagi, pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Poso Kota tahun 2022. Data yang dihimpun redaksi menyebutkan, pekerjaan dua paket proyek ini terlambat karena ada dugaan pengistimewaan kepada kedua perusahaan. Akibatnya, perusahaan tidak terpacu untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Pekerjaan dua paket proyek itu menambah durasi tahun, padahal bukan proyek multiyears, demikian data tertulis yang diterima media ini, Minggu 5/2/2023. PPK dan kontraktor, ada dugaan bekerjasama supaya anggaran proyek tidak dikembalikan ke kas negara meski pekerjaan terlambat.

Berita dari (Serambinews, 2018) Hingga akhir pekan lalu, ada 460 paket proyek Pemerintahan Aceh yang waktu penyelesaiannya sudah sangat kritis. Karenanya, Asisten II Setda Aceh, Dokter Taqwallah M. Kes, mengingatkan para kontraktor bahwa, masa kerja tahun anggaran 2017 tinggal 12 hari lagi. Jika kontraktor tidak bisa menuntaskan borongan proyek fisiknya sebelum 31 Desember 2017, maka akan ada pemotongan kontrak. Peringatan juga disampaikan kepada para kepala Satuan Kerja Perangkat SKPA, Kuasa Pengguna Anggaran KPA, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK proyek fisik APBA 2017 untuk lebih serius lagi menyelesaikan proyek fisiknya yang masuk dalam status kritis karena realisasinya masih di bawah 75 persen. Taqwallah memotivasi para kontraktor, kepala SKPA, KPA, dan PPTK, agar proyek fisik yang tergolong kritis itu, tidak sampai putus kontrak.

Banyak faktor yang menjadi sebab dari keterlambatan suatu pembangunan, yang mana keterlambatan itu dapat di artikan bahwa waktu yang sudah dijadwalkan itu tidak berjalan sesuai kesepakatan suatu pembangunan. Sehingga akan ada penambahan waktu, penambahan biaya, bahkan penambahan tenaga kerja untuk menanggulangi keterlambatan.

Pada objek itu, peneliti kali ini berfokus pada pengerjaan *seawall* yang dikerjakan pada proyek pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Gesing. Dimana pengerjaan tersebut juga masih belum selesai pada waktu yang sudah ditentukan oleh kontraktor.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini terdapat beberapa poin sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan potensi keterlambatan pada pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Gesing ?
2. Kenapa perlu diketahui potensi keterlambatan pada pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Gesing ?
3. Bagaimana cara mengetahui pembangunan konstruksi dikatakan terlambat?

4. Siapa yang mengalami kerugian dari pembangunan yang mengalami keterlambatan?
5. Kapan kegiatan pembangunan dapat dinyatakan terlambat?
6. Berapa nilai risiko tertinggi dalam pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Gesing?

### **1.3 Lingkup Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka lingkup penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini membahas tentang potensi keterlambatan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Gesing pada pekerjaan Pembangunan *seawall*.
2. Penelitian ini berlandaskan kepada manajemen konstruksi pembangunan potensi keterlambatan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Gesing (PPI Gesing).
3. Penelitian ini mencakup potensi teknis pekerjaan yang berpengaruh pada waktu pelaksanaan pembangunan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan perumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menilai risiko kegiatan yang berpotensi menyebabkan keterlambatan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing dengan nilai tertinggi.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis berharap bisa memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca sebagai berikut :

1. Dapat mengidentifikasi suatu keterlambatan pembangunan sehingga dapat memberikan solusi atas problematika yang terjadi sehingga pembangunan dapat terus berjalan hingga selesai.
2. Penulis mendapat tambahan ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam membaca suatu masalah yang ada di pembangunan dan menjadikannya kesimpulan yang mendasar,

3. Mengembangkan ilmu manajemen konstruksi menjadi sebuah bahan referensi dan dapat digunakan sebagai bahan kajian penelitian lainnya.